

Pembangunan Wilayah: Bagian dari Pemberantas Kemiskinan

Syachrinuddin SEMAN

Pendahuluan

PERSOALAN dalam penjabaran suatu kebijaksanaan ekonomi adalah cukup rumit. Hal ini khususnya terasa untuk pembicaraan mengenai pembangunan wilayah yang akhir-akhir ini banyak dan hangat diperbincangkan orang. Kendati demikian, cukup dimaklumi bahwa persoalan pembangunan wilayah bukanlah suatu konsep yang baru. Konsep pembangunan wilayah menjadi menonjol karena adanya kesenjangan ekonomi dan sosial sebagai akibat pelaksanaan pembangunan.

Jelasnya pangkal tolak dari timbulnya masalah pembangunan wilayah tidak lain adalah persoalan klasik sejak zaman Malthus dan Ricardo sampai dengan apa yang dilontarkan oleh Kuznets (1955) yaitu, apakah terjadinya pembangunan ekonomi pada gilirannya akan menghasilkan kesenjangan dalam pembagian pendapatan ataukah justru menghasilkan pemerataan?

Persoalan yang paradoksal ini sudah terjawab bahwa memang ada jurang perbedaan sebagai akibat pembangunan berupa pembagian pendapatan yang tidak merata di masyarakat: antar kecamatan, kabupaten, provinsi serta wilayah. Jelasnya, jurang perbedaan ini secara absolut maupun relatif sebenarnya masih tetap akan ditemui sebagai masalah kepincangan pembangunan, yang tercermin dalam ketidakmerataan pendapatan dan masih banyaknya kemiskinan. Apalagi di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Oleh sebab itu, timbulnya ilmu pembangunan wilayah tidak lain adalah upaya memerangi kepincangan pembangunan agar pertumbuhan ekonomi setidaknya dapat menghapuskan kesenjangan dalam pembagian pendapatan masyarakat dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Amanat GBHN sejak Pelita III sampai Pelita V ternyata masih menonjolkan butir pemerataan sebagai urutan pertama trilogi pembangunan. Hal ini menandakan makna bahwa pemerataan baik ekonomi maupun

sosial, budaya, dan politik menjadi prioritas. Dengan ini prioritas dalam pembangunan wilayah mencakup keserempakan tanpa mengabaikan stabilitas nasional. Walaupun sejak tahun 1974 strategi pembangunan wilayah telah dicanangkan, namun ada kesan bahwa upaya operasional pembangunan wilayah ini masih dihadang kendala yang cukup banyak. Berangkat dari hal itulah, maka tulisan ini mencoba mengamati permasalahan pembangunan wilayah terutama berkaitan dengan sampai seberapa jauhkah besarnya kesenjangan antara masyarakat yang miskin dengan yang kaya.

Teori Kemiskinan

Kendati studi kemiskinan banyak dilakukan namun istilah "garis kemiskinan" muncul dan diakui secara resmi dalam Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang DPR tanggal 16 Agustus 1984. Sejak itu garis kemiskinan telah menjadi ajang studi dari berbagai pakar di Indonesia.

Secara konseptual kemiskinan dapat dibagi dalam tiga pengertian, yakni kemiskinan subyektif, absolut/mutlak, dan relatif. Kemiskinan subyektif dilandasi ukuran pada dirinya sendiri, yakni membandingkan antara kebutuhan dan keinginan perorangan secara individual. Selanjutnya, kemiskinan absolut (Rowntress, 1901) diukur dengan kebutuhan fisik minimum, jadi ada ukuran standarnya. Sedangkan kemiskinan relatif dilandasi dengan konsep *relative deprivation*, yakni posisi seorang relatif terhadap anggota masyarakat lainnya.

Sesuai dengan konsep kemiskinan ini maka para ahli mencari penyebab dari kemiskinan tersebut. Di Indonesia penyebab dari kemiskinan tidak lain akibat dari kemis-

kinan struktural di mana masyarakat karena struktur sosialnya tidak dapat menikmati/ikut menggunakan sumber yang tersedia (Sumarjan, 1988:8). Sementara itu, pada sisi lain kemiskinan di Indonesia bukanlah semata-mata berangkat dari kemiskinan struktural, tetapi berhubungan erat dengan *Entitlement* (Sen, 1984:496). Oleh Syahrir dikatakan bahwa *entitlement* merupakan kemampuan dari seseorang memiliki sejumlah *asset* yang seharusnya/semestinya ia miliki dan hasilkan dan dapat diperdagangkan.

Faktor "kemampuan" menguasai alat produksi inilah yang sering dijadikan alat/cara oleh kelompok lain yang lebih tahu untuk mengambalihnya. Ketidakmampuan menguasai pemilikan *asset* atau *entitlement* serta distribusi pendapatan akan mengakibatkan partisipasi rendah dalam pembangunan, yang pada gilirannya kelompok ini tertinggal dengan kelompok lain sehingga terciptalah bentuk kepincangan. Celaknya, kurangnya partisipasi masyarakat itu sering dijadikan kambing hitam, padahal partisipasi masyarakat merupakan akibat. Pernyataan yang salah seperti ini perlu diluruskan, sehingga tidak terdengar *kurangnya partisipasi masyarakat* dijadikan pangkal penyebab dari lambannya pembangunan.

Berbagai Pengukuran Kemiskinan

Hasil dari Seminar Widyakarya yang diadakan oleh BPS mendokumentasikan bahwa tidak kurang dari lima sampai enam pakar maupun lembaga mencoba menganalisis pengukuran kemiskinan yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Prof. Sayogyo dengan konsep perbandingan antar kelas pendapatan keluarga menghasilkan perhitungan de-

ngan "setara" beras. Hal ini dimaksudkan agar dapat sesuai dengan kondisi setempat, walaupun cukup dimaklumi bahwa pengukuran pendapatan dengan ekuivalen beras agak cukup riskan karena masih terpengaruh oleh harga. Hasil perhitungan Sayogyo ini menemukan bahwa ada tiga garis kemiskinan yakni:

	Desa	Kota
1. Melarat	180 kg	270 kg
2. Sangat Miskin	240 kg	360 kg
3. Miskin	320 kg	480 kg

Mungkin pengertian melarat untuk sekarang ini sudah habis, sehingga Sayogyo menghilangkan garis melarat (kemelaratan) dan menambah dengan Garis Nyaris Miskin dengan ukuran 480 kg di desa dan 720 kg di kota.

Searah dengan Sayogyo, maka Sam F. Poli mengukur garis kemiskinan dengan ekuivalen konsumsi beras per kapita. Ukuran yang digunakan adalah 27 kilogram ekuivalen beras bagi daerah pedesaan dan 40 kilogram ekuivalen beras bagi daerah kota. Angka tersebut dikatakan sebagai ukuran *pendapatan minimum* yang selanjutnya dikalikan dengan rata-rata jumlah anggota keluarga di Indonesia, yakni lima jiwa per keluarga.

LN. Parera melihat kemiskinan dari wujud tingkat minimum kebutuhan gizi dengan ukuran Rp. 15.000,00 bagi rumah tangga pedesaan dan Rp. 25.000,00 bagi rumah tangga perkotaan.

Prof. Sumitro mengambil angka dasar dari Bank Dunia, yang oleh Sumitro disempurnakan dengan ukuran US\$50 per kapita untuk pedesaan dan US\$75 untuk perkotaan.

Pada sisi lain Biro Pusat Statistik (1984) menggunakan dua garis kemiskinan. Dikata-

kan sangat miskin adalah jika seseorang hanya mampu memenuhi kebutuhan 2.100 kalori. Selanjutnya dikatakan miskin yaitu apabila mampu memenuhi kebutuhan pokok 2.100 kalori ditambah dengan kebutuhan minimum lainnya seperti pakaian, pendidikan, kesehatan, angkutan, luas pemilikan tanah, luas lantai hunian, jumlah jam kerja dari kepala rumah tangga. Tampaknya ukuran yang digunakan oleh BPS ini cukup mapan serta sebagai penampilan kesejahteraan masyarakat yang cukup baik.

Bentuk pengukuran yang digunakan memang banyak mendapat kritik, sebab ukuran ekuivalen beras acap kali terganggu oleh perbedaan harga beras. Namun kritik yang paling penting adalah adanya pertanyaan "Bagaimanakah jalan pemecahan mengurangi kesenjangan kemiskinan, dan apa yang harus diperbuat bagi masyarakat miskin?" Hal ini didasarkan pada ucapan Gunawan (1989) yang acap kali membuat orang bertengkar tentang berapa jumlah orang miskin di Indonesia. Tetapi bagaimana menguranginya secara operasional? Inilah yang agak kurang dilakukan! Kendati Gunawan Sumodiningrat sendiri mengatakan kemiskinan itu tidak akan dapat dihapuskan, namun dapat dikurangi dengan strategi mengurangi jenjang perbedaan kelompok kaya (papan atas) dengan kelompok miskin (papan bawah).

Hasil Pengukuran Ketimpangan Distribusi

Ukuran ketimpangan distribusi pendapatan per kapita yang dipakai berdasarkan ukuran dari Bank Dunia. Pembagian pendapatan dikatakan berketimpangan tinggi adalah bila 40% penduduk termiskin memperoleh kurang dari 12% pendapatan

total. Berketimpangan sedang yaitu bila 40% penduduk termiskin menerima 12-17% pendapatan, dan berketimpangan rendah bila 40% penduduk termiskin sudah mencapai lebih dari 17% pendapatan total masyarakat.

Pada tahun 1976 penduduk Indonesia di perkotaan untuk lepas dari status kategori miskin harus mempunyai tingkat pendapatan sebulan Rp. 4.522,00 per kapita. Artinya bila rumah tangganya mempunyai tiga (3) anak, maka untuk dapat menghidupi keluarga dibutuhkan lima kalinya yakni Rp. 22.610,00. Dalam tahun 1987 pendapatan minimal per kapita adalah Rp. 17.381,00. Ini berarti untuk lima jiwa dalam satu rumah tangga dibutuhkan pendapatan sebulan Rp. 86.905,00. Sedangkan bagi pedesaan batas garis kemiskinan yakni Rp. 14.255,00 per keluarga untuk tahun 1976 dan Rp. 51.470,00 pada tahun 1987.

Angka tersebut sebenarnya tidaklah mencerminkan kesenjangan, namun bila ditunjukkan dalam suatu gambaran grafik akan terlihat betapa adanya kesenjangan yang cukup tinggi antara pedesaan dan perkotaan. Perbedaan kesenjangan inilah yang perlu diantisipasi secara cepat dan tuntas dalam rangka segera mengurangi kesenjangan pendapatan penduduk perkotaan dan pedesaan.

Sampai saat ini berbagai data telah menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru mengakibatkan populasi penduduk miskin menurun drastis karena adanya akibat "trickle down." Efek menetes ini sering dikatakan pula sebagai suatu cerminan dari pemerataan hasil pembangunan. Keberhasilan pembangunan tampak dari adanya penurunan persentase kemiskinan sejak tahun 1976-

1987 sebesar 10% di pedesaan dan 16% di perkotaan. Secara keseluruhan penduduk yang miskin di Indonesia masih tinggal 17,4%. Dibandingkan dengan negara-negara Amerika Latin yang masih sebesar 28,7%, negara-negara Asia Selatan 26% dan rata-rata dunia 24%, maka kemiskinan di Indonesia memang mengalami penurunan yang cukup drastis.

Meski kondisi ini cukup mengembirakan, namun berkurangnya kemiskinan yang disinyalir oleh beberapa ahli sudah banyak tampak di Jawa ternyata untuk luar Jawa tidak menunjukkan angka yang berarti. Dengan kata lain, akibat "trickle down" belum terlalu banyak menetes di luar Jawa. Kemudian orang pun sering mengatakan teori efek menetes dalam pembangunan ekonomi adalah relatif lamban, atau kalau tidak mau dikatakan sebagai kurang etis. Selanjutnya, yang paling lamban menikmati hasil pembangunan adalah masyarakat yang jauh dari pusat pembangunan.

Oleh sebab itu, pemerintah telah mengantisipasi gejala itu dengan upaya terobosan dalam bentuk strategi pembangunan wilayah, yakni secara konseptual membentuk daerah Wilayah Pembangunan Utama, yang dimulai sejak 1974. Tampaknya konsep pembangunan wilayah ini masih "belum dioperasionalkan." Sementara ini masih diandalkan sistem sentralisasi dengan bentuk pembangunan bercorak seragam, perencanaan seragam dan pelaksanaan seragam. Padahal, pola sentralisasi lemah jangkauannya ke berbagai wilayah, apalagi kalau dihadapang letak geografis yang tidak menguntungkan, pola sosial yang berbeda, budaya maupun corak ekonomi yang berlain-lainan. Akibatnya, korban dari kesalahan kebijakan tersebut akan dirasakan oleh masyarakat, yang kurang terpantau dari pusat pemerintahan.

Strategi Memberantas Kemiskinan

Tujuan dari pembangunan wilayah adalah sebagai strategi untuk semakin menghilangkan kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin. Bentuk penjabarannya secara mikro guna mengurangi kesenjangan biasanya melalui program khusus. Hampir semua departemen sudah mempunyai program tersebut, seperti "income generating" yang dilakukan BKKBN, proyek "padat karya" oleh Departemen Tenaga Kerja, proyek Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K) oleh Departemen Pertanian, proyek Pembinaan Industri Kecil oleh Departemen Perindustrian, dan lain-lain. Program yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ini hampir sama dengan tulisan Swapna (1986:13), bahwa kebijakan untuk memperkecil kesenjangan adalah melalui peningkatan produktivitas masyarakat seperti diuraikan di bawah ini:

A. Program-program yang langsung meningkatkan produktivitas penduduk miskin:

1. Land-reform berbentuk
 - a. perbaikan pembagian tanah,
 - b. perluasan pemilikan tanah dan program pemukiman kembali,
 - c. perbaikan sewa-menyewa tanah,
 - d. pengorganisasian petani seperti dengan pembentukan koperasi-koperasi.
2. Program-program peningkatan produksi pertanian usaha perbaikan pembagian pendapatan.
3. Program-program umum peningkatan produktivitas yang tidak secara khusus ditujukan pada penduduk miskin, melainkan yang mampu menghasilkan daya guna bagi kepentingan kelompok-kelompok miskin.

B. Program-program yang pertama-tama menghasilkan lapangan kerja yang sekaligus berguna untuk membangun infrastruktur pedesaan, dan akibatnya meningkatkan produktivitas. Hal ini meliputi semua jenis pekerjaan umum dan program-program memenuhi kebutuhan pangan untuk dapat bekerja (*food-for-work*).

C. Program-program berciri pemenuhan kebutuhan minimum berorientasikan kesejahteraan yang dapat berupa baik program umum, yaitu tanpa dimaksudkan untuk kelompok sasaran, maupun program khusus yang ditujukan untuk penduduk miskin tertentu misalnya di pedesaan.

Dari apa yang dikatakan oleh Swapna tersebut menurut Gunawan Sumodiningrat semua telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia seperti "agrarian reform," kebijaksanaan harga pertanian, adanya harga dasar, serta subsidi input. Lebih jauh lagi, program penciptaan kesempatan kerja di luar sektor pertanian juga sudah dilaksanakan seperti "padat karya," kredit industri kecil, kredit pedesaan, kredit candak kulak, *income generating*, pembinaan sosial dan sebagainya.

Pelaksanaan strategi tersebut sesungguhnya banyak mengalami hambatan. Malahan ada beberapa program seperti program *Padat Karya* yaitu membuat prasarana jalan, jembatan, bendungan kecil, ternyata hasilnya banyak dinikmati oleh orang luar pedesaan. Hal ini karena tidak adanya tenaga ahli serta tenaga teknisi yang memadai di pedesaan. Akibatnya kualitas hasil pekerjaan jelas tidak memenuhi harapan. Disinyalir pula oleh banyak pakar pengamat kemiskinan bahwa, bentuk proyek padat karya diubah dengan cara mengontrakkan kepada orang kota (sebagai kontraktor) kemudian masyarakat yang ada di desa hanya menerima upah yang acapkali hanya dalam jangka waktu pendek. Akhirnya yang kaya tetap kontraktor dan masyarakat pedesaan tetap saja miskin. Akhirnya program *food-for-work* yang dilakukan saat ini cenderung dapat dikategorikan bukan untuk orang miskin.

Kebijakan harga dasar yang dilakukan untuk tanaman pangan ternyata banyak tidak menguntungkan petani produsen. Ber-

bagai studi menunjukkan bahwa nilai tukar yang didapat petani dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan menurun dalam nilai riil. Lebih jauh lagi, naiknya harga dasar gabah biasanya dengan cepat menggenjot harga barang industri lainnya. Sebaliknya, kenaikan harga industri tidak mempengaruhi harga tukar tanaman pangan. Akibatnya, petani padi hampir stabil saja dalam tingkat pendapatan.

Program kredit pedesaan yang tampak dalam pelaksanaannya dihadang banyak kendala, di antaranya tidak samanya persepsi aparat perbankan secara teknis ekonomis dengan masyarakat miskin pedesaan yang kebanyakan masih lugu. Oleh sebab itu, banyak dana kredit pedesaan hanya dinikmati oleh masyarakat pedesaan yang berkategori tertentu. Pada akhirnya, tujuan program kredit pedesaan yang dicanangkan pemerintah dengan maksud mulia itu tidak terlalu menyentuh masyarakat miskin.

Undang-undang Landreform yang telah dicanangkan sejak tahun 1962 sampai saat ini menunjukkan kesan hanya merupakan sebuah tulisan undang-undang saja. Kendati di tahun-tahun awal program ini cukup berwujud. Beberapa studi yang dilakukan banyak menilai pelaksanaan undang-undang landreform sebagai *lipservice* saja. Hal yang lebih parah lagi adalah pelaksanaan Undang-undang Bagi Hasil di mana undang-undang bagi hasil antara petani dan penggarap sebenarnya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Suatu studi yang dilakukan di kabupaten Lombok Barat (NTB) menunjukkan bahwa undang-undang bagi hasil hanya dilakukan oleh 20% pemilik tanah kepada penyakapnya. Malahan 25% dari petani penggarap tidak mengetahui tentang adanya undang-undang bagi hasil.

Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan beberapa pakar kemiskinan seperti Mubyar-to, Gunawan, Sayogyo, Singarimbun, dan lainnya masih lantang berucap bahwa cukup banyak petani penggarap dan buruh tani tetap tidak banyak tersentuh oleh lajunya derap pembangunan. Sudah tentu hal ini bukanlah kesalahan program pemerintah yang cukup bagus idenya, tetapi berkaitan dengan cara penjabaran, pengertian, aplikasi, dan pengawasan belum sempurna yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Di samping itu, rentang pengawasan adalah terlalu panjang dan banyak aparat tidak menghayati arti serta tujuan pembangunan yang sebenarnya.

Upaya Pembangunan Wilayah

Salah satu tujuan dari pembangunan wilayah adalah untuk menekan disparitas pendapatan serta mengurangi kesenjangan dalam kemiskinan antar wilayah, propinsi, kabupaten maupun kecamatan, serta antara kota dan desa melalui konsep pembangunan wilayah. Di samping itu tujuan dari konsep makro pembangunan wilayah tidak lain kecuali mengurangi disparitas pendapatan regional, meningkatkan aspek spasial, dan untuk menyelaraskan pola pembangunan ataupun pendapatan antara kota dan pedesaan.

Memang diakui bahwa konsep pembangunan wilayah sudah dilakukan sejak bulan Maret 1974, yakni penyusunan rencana perwilayahan di mana 26 Daerah Tingkat I (propinsi) dikelompokkan menjadi empat Wilayah Pembangunan Utama (WPU). Dalam hal ini ibu kota propinsi yang terbesar di masing-masing wilayah tersebut ditetapkan sebagai pusatnya. Setiap pembangunan wilayah utama ini dibagi-bagi menjadi pembangunan wilayah berdasarkan propinsi. Se-

tiap propinsi kemudian dibagi dalam beberapa sub-wilayah dengan pusatnya masing-masing. Pusat-pusat tersebut berbentuk hirarkis sesuai dengan alur administratif.

Jadi pada saat itu sistem wilayah pembangunan nasional mempunyai 87 pusat, yang terdiri dari empat kota utama dan 10 kota lagi sebagai sub-hirarkis pusat pembangunan, ditambah 77 kota sebagai pusat yang terkecil. Kriteria yang digunakan saat itu adalah harus ada persentuhan wilayah (*contiguity*), keserupaan kondisi pembangunan dan potensi sumber daya alam, komplementaritas antar wilayah dalam pembangunan ekonomi dan sosial dan dalam prasarana fisik yang utama seperti jalan raya serta komunikasi lainnya.

Kemudian konsep pembangunan disempurnakan lagi pada saat menjelang Pelita IV, di mana Wilayah Pembangunan Utama (WPU) menjadi lima buah. Perubahan terdiri dari NTB dan NTT yang semula termasuk WPU D menjadi bagian dari WPU B. Sementara itu, Maluku serta Irian Jaya membentuk wilayah tersendiri yakni WPU E dengan pusatnya Ambon.

Dari pengamatan sepintas ternyata ada kesan bahwa pembangunan wilayah yang dicanangkan sebagai usaha mengurangi kesenjangan disparitas pendapatan, termasuk kemiskinan, barulah dalam kerangka konsep dan belum dioperasionalkan sebagaimana mestinya. Lebih jauh lagi, ternyata setiap departemen masih menentukan daerah kerjanya masing-masing. Maka tumpang-tindih dalam program acap kali dijumpai. Misalnya banyak dijumpai program bagi kelompok berpenghasilan rendah untuk satu wilayah, dilakukan oleh berbagai departemen sehingga koordinasi tampaknya di atas kertas saja.

Banyak kekurangan lain yang dijumpai dalam konsep pembangunan wilayah, di antaranya adalah kriteria jumlah penduduk dan besarnya arus barang dan jasa tanpa memperhatikan kapasitas pelayanan umum dan bobot fasilitasnya. Pola pelayanan arus komunikasi pun sangat tidak seimbang, karena walaupun sudah dinamakan pusat WPU (misalnya Ambon) namun fasilitasnya tidak lebih baik dari pelabuhan Tegal (Jawa Tengah).

Hal lain terlihat bahwa BAPPEDA memang ada di tiap propinsi maupun kabupaten, tetapi tidak ada BAPPEDA WPU yang membawahi beberapa propinsi. Akibatnya, yang tampak ialah pola pembangunan masih berorientasi pada pemecahan pembangunan yang sementara (*instant*), tanpa melihat proyek-proyek yang mempunyai cakrawala jangka panjang yang berdimensi luas yang melewati jangkauan administratif. Akhirnya daerah antara (*border province*) jarang terjangkau, malahan tidak jarang diabaikan.

Oleh sebab itu, konsep pembangunan wilayah yang ada pada saat ini perlu dikaji lebih dalam lagi. Apabila konsep tersebut sudah tepat, seyogyanya perlu operasionalisasi yang mantap. Dalam arti, pemerintah pusat berani memberi peluang *otonomi* kepada pembangunan wilayah yang sudah dioperasionalkan, dengan cara uji coba tentunya. Diharapkan ada keberanian pada pemerintah pusat untuk memberi peluang *otonomi* kepada pemerintah daerah yang tercakup dalam pembangunan wilayah. Dengan adanya peluang *otonomi* maka penyelenggaraan program yang menyentuh kelompok papan bawah diharapkan akan lebih kena dan tepat. Akhirnya, kesenjangan kemiskinan dapat makin dikurangi dan kue pembangunan pun dinikmati oleh masyarakat yang jauh dari pusat pembangunan.

Penutup

Kemiskinan yang masih menandai kondisi di Indonesia sebenarnya mengalami penurunan yang drastis dan jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan negara berkembang lainnya di Asia, Amerika Latin serta Afrika. Kendati pun kemiskinan terlihat turun dengan cepat di Jawa, namun di luar pulau Jawa belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang cepat. Salah satu upaya untuk memerangi kemiskinan tersebut ialah dengan cara peningkatan produktivitas.

Hal lain yang penting adalah usaha mengembangkan konsep pembangunan wilayah seharusnya lebih dioperasionalkan. Masalahnya adalah konsep pembangunan wilayah masih merupakan "konsep" yang belum jalan sepenuhnya. Padahal, konsep pembangunan wilayah sangat bertalian erat dengan pengembangan sumber daya manusia, produktivitas, efisiensi serta pemberian otonomi wilayah demi mengembangkan keputusan pembangunan. Dengan cara ini setidaknya-tidaknya masalah kesenjangan kemiskinan di luar Jawa lebih cepat tertanggulangi. Walaupun demikian, semuanya jelas berpulang kepada kemauan politik.

RUJUKAN

- Adisasmita, Rahardja. *Rencana Pembangunan Nasional, Disparitas Pembangunan, Perwilayahan Regional dan Pola Perkotaan di Indonesia*. Ujung Pandang: Fakultas Pascasarjana UNHAS, 1988.
- Alfian, Tan, Melly G., dan Sumardjan, Selo. ed. *Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1980.
- Biro Pusat Statistik. *Indikator Pemerataan: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 1976-1981*. Jakarta: BPS, 1984.
- Departemen Penerangan RI. *Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat 1984/1985/1988/1989*. Jakarta: Deppen, 1984.
- Sumodiningrat, Gunawan. "Dilema Pemerataan di Tengah Kemajuan Ekonomi Indonesia." Paper Disajikan pada Diskusi Panel Ahli Ekonomi Kompas ke-14, Jakarta, 1-2 Juli 1989.
- "Kemiskinan di Indonesia: Konsep, Fakta dan Kebijakan-sanaan Mengurangi." Dalam Lokakarya Ilmu Pengetahuan dan Kebijakan-sanaan bagi Pemberantasan Kemiskinan, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta, 1989.
- Hardiman, Margaret dan Midgley, James. *The Social Dimension Foreign Investment and Industrialization in Indonesia*. Singapore: East Asian Social Science Monograph, 1988.
- Sjahrir. *Ekonomi, Politik, Kebutuhan Pokok, Sebuah Tinjauan Prospektif*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1986.